

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno. 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Muliadi, 2013, Politik Hukum, Akademia Permata, Padang.
- Ahmad Redi, 2013, *Hukum Pertambangan Indonesia*: Gramata Publishing, Bekasi.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, UII Press, Yogyakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Azwar Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- B. Arief Sidharta, 2006, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan korupsi dan Penegakan hukum*, Kompas, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh, (Trading in influence) di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Efa Laela Fakhriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta.
- Fachrizar Afandi, 2022, “Slide PPT Webinar MAHUPIKI Diskresi Jaksa Dalam Penghentian Perkara Pidana Korupsi: Antara Kepentingan Umum dan Keadilan Restoratif”.
- Fajrurahman Jurdi, 2007, *Logika Hukum*, kencana, Jakarta.
- Farida Patittingi dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Litera, Yogyakarta.
- H. Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Padang.
- H. Margono, 2020, *Asas Keadilan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

- H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- H.R Otje Salman S , 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Kejaksaan Agung dan Kemandirian Konstitusional Dalam Humanisme dan Pembaharuan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2014, *Kejaksaan Agung: Reposisi Independensi dan Konstitusional*, Adhyaksa Indonesia, Jakarta.
- Indriyatno Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit media, Jakarta.
- Jan. S. Maringka, 2018, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana, normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Lilik Rasyidi & Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- M. Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*, Kencana, Jakarta.
- Mansyur Semma, 2008, *Negara Dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Maria, S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, PT. Alumni Bandung.
- Mochtar Lubis, 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Monstesquieu, 2007, *The Spirit of the Laws*, Nusa Media, Bandung.
- Muhammad Junaidi, 2018, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto.Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press Yogyakarta.

- _____, 2010, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum BPK*, Gunung Mulia Jakarta.
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan; Pendekatan Ekonomi Politik*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum, Yogyakarta.
- O.C. Kaligis, 2008, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, 2015, *Deponeering Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Osman Simanjuntak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT. Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- RM Surachman dan Jan S. Maringka, 2015, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenada Media Group, Makassar.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SF Marbun, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta, 2007, *Utilitarianisme*, Universitas Taruma Negara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2010, *Pembaharuan Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sri Sutatiek, 2011, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sukarno Aburaera, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Charisma Putra Utama, Jakarta.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.

Tim MaPPI FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainal Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

C. Karya Ilmiah

A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014.

Aditia Warman, 2017, "Kedudukan *Deponeering* Sebagai Manifestasi Asas Oportunitas Dalam Perkara Pidana", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang.

Andi Hamzah, Sri Mulyani dkk, 2006, Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006.

Arin Karnisari, 2012, "Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum", *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia.

Aris Mustriadhi, 2019," Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponeering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Dalam Konteks Kepastian Hukum", Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007.

Hariman satria, "Pembalikan Pembuktian Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi", *Jurnal Hukum Legisme*, Vol II No. 1 Maret 2012.

- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta* Edisi : 59 Januari 2019.
- Husnan Wadi, “Perselisihan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi Sumber Daya Air”, *Jurnal IUS* Vol. II No. 5 Agustus 2014.
- I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1 Februari, 2021.
- Karniasari, Arin. 2012. “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum” *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Khunaifi Alhumami, 2007, “Perubahan Status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan Serta Pengaruhnya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, 2011, “Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan”, *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Maio Julyanti & Adit, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Cepido*, Vol. 01 No. 01 Juli 2019.
- Marsudi Utomo, “Kewenangan Deponeering Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Al Adl*, Volume IX No.20 Febuari 2021.
- Miftakur Rohaman, “Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jarremy Bentham”, *MIYAH Jurnal Studi Islam* Vol. 16 No. 02 Agustus 2020.
- Mirza Satria Buana, 2010, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muhamad Yodi Nugraha, “Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan” *VeJ* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 Juni 2016.

Raimond Flora Lamandasa, Penegakan Hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, 2011, *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Romy Patra, “Urgensi Kejaksaan Diatur Dalam Konstitusi”, *Jurnal Hukum Hasanuddin Law Review*, Volume 1, Issue 3, Desember 2015.

Widya Yuridika, “Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-Xiv/2016” *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2021.

D. Internet

Andi Hamzah, Sri Mulyani dkk, Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006. https://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana, diakses pada tanggal 23 Januari 2022.

Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, diakses tgl. 23 September 2021.

Gloria Natalia, Nasional Kontan, “Akhirnya Kejaksaan Mendeponir Kasus Bibit Chandra”, <https://nasional.kontan.co.id/news/akhirnya-kejaksaan-mendeponir-kasus-bibit-chandra-1>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

Indonesia Corruption Watch, “Kejaksaan Resmi Deponeering Kasus Bibit-Chandra”, <https://antikorupsi.org/id/article/kejaksaan-resmi-deponering-kasus-bibit-chandra>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Menerbitkan SKPP Perkara Bibit dan Chandra”, https://www.kejaksaan.go.id/unit_ke

[jaksaan.php?idu=31&idsu=48&idke=0&hal=12&id=1510&bc=](#),
diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

NN, “Isi Rekomendasi Tim 8 (lengkap) Untuk Kasus Bibit Chandra”, *http://berandakawasanwordpress.com/2010/10/02*, diakses pada tanggal 3 Maret 2022.

Tempo, “Komisi III Nilai SKPP Kasus Bibit Chandra Kurang Tepat”, <https://nasional.tempo.co/read/211223/komisi-iii-nilai-skpp-kasus-bibit-chandra-kurang-tepat/full&view=ok>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022.